

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Rohingya sebagai tragedi kemanusiaan sudah berlangsung selama beberapa tahun. Dengan peningkatan intensitas publikasi dan jumlah pengungsi lintas negara, pengaruh konflik Rohingya tidak hanya level domestik, melainkan sudah memberikan pengaruh dan menjadi isu regional bahkan internasional. Kasus yang terjadi di Myanmar merupakan konflik internal yang dilakukan oleh pemerintah junta militer terhadap etnis Rohingya yang terjadi sejak lama. Permasalahan ini menjadi salah satu isu internasional dikarenakan sikap pemerintah Myanmar yang tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya yang merupakan minoritas muslim di Myanmar yang menyebabkan perpecahan dan berlanjut pada suatu konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan terjadinya arus pengungsian besar-besaran etnis Rohingya ke berbagai wilayah negara yang dipandang aman dan bersedia menampung para pengungsi termasuk dalam wilayah Indonesia tepatnya di Aceh. (Yumitro, 2017)

Kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia yaitu Aceh dimana daerah tersebut yang paling banyak kedatangan pengungsi Rohingya, hal ini dikarenakan secara geografis wilayah Aceh merupakan yang paling dekat dengan Myanmar. Selain itu, Indonesia menerima kedatangan pengungsi etnis Rohingya karena adanya kesamaan identitas sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal tersebut ditunjukkan oleh masyarakat lokal Aceh yang akhirnya

mengkonstruksikan Indonesia menerima para pengungsi yang menjadi korban dari tindak pelanggaran hak asasi manusia dari negara asalnya Myanmar. Norma hak asasi manusia telah mendorong Indonesia untuk mengenyampingkan problem sosial yang akan timbul dengan banyaknya pengungsi yang berada di Aceh (Kusuma, 2016). Di Aceh pengungsi Rohingya banyak dibantu oleh masyarakat maupun pemerintah dimana banyak ditemui mulai dari kamp-kamp pengungsian, posko kesehatan, kebutuhan pangan, sandang dan posko pendidikan. Karena kondisi awal etnis Rohingya sampai di Aceh sangat memperhatikan seperti kurangnya asupan gizi, kelaparan dan trauma atas tindakan kekerasan

Isu internasional mengenai pengungsi terutama pengungsi perempuan menjadi permasalahan penting bagi dunia internasional. Pengungsi tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan hak asasi manusia karena pengungsi merupakan orang-orang yang rentan terkena pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dan permasalahan kebutuhan yang dialami oleh perempuan di pengungsian cukup beragam. Pengungsi perempuan selalu mengalami resiko lebih besar karena kurangnya perlindungan, resiko tersebut mencakup potensi menjadi korban eksploitasi, pelecehan seksual, kekerasan, kawin paksa, penyakit reproduksi dan bahkan kematian, sedangkan permasalahan spesifik yang sering dialami oleh perempuan yaitu ketidakstabilan psikologis, permasalahan kesehatan reproduksi dan kehamilan. Ketidakstabilan psikologis yang dialami pengungsi Rohingya di Aceh juga disebabkan oleh permasalahan kebersihan yang berdampak pada penurunan kondisi tubuh, serta

kurangnya sarana sanitasi dan air bersih yang dibutuhkan pengungsi menyebabkan menurunnya kualitas hidup mereka (Martiany, 2015)

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul akibat adanya pengungsi etnis Rohingya khususnya pengungsi perempuan di Aceh, maka *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi internasional komisioner tinggi PBB untuk pengungsi terus mengambil langkah-langkah dalam menanggapi pengungsi Rohingya di Aceh melalui kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi dalam melindungi hak-haknya sebagai pengungsi. Hal ini didasari oleh UNHCR yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan pengungsi dan memberikan bantuan kepada pengungsi serta dalam hal perlindungan pengungsi untuk berupaya mengatasi permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingya di Aceh. UNHCR berwenang memberikan perlindungan berdasarkan alasan kemanusiaan dan non politik, perlindungan Internasional terhadap pengungsi serta mencarikan solusi untuk para pengungsi, dimana perlindungan tersebut merupakan dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* atau pemulangan kembali secara paksa ketempat mereka berasal (Suryono, 2021)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana peranan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Perlindungan Terhadap Pengungsi Perempuan Etnis Rohingya Di Aceh Tahun 2015-2017 ?”**.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan UNHCR dalam perlindungan terhadap pengungsi perempuan etnis Rohingya di Aceh tahun 2015-2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya: Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu ilmu pengetahuan terutama bagi mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban Bumiayu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai masalah pengungsi dan bagaimana peranan UNHCR dalam perlindungannya terhadap pengungsi perempuan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam suatu penelitian sangat diperlukan karena teori tersebut menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Fungsi teori dalam penelitian sendiri adalah untuk memberikan arahan dan petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, rasional, kenyataan, dalam menjelaskan suatu fenomenal.

Penelitian ini menggunakan teori peranan organisasi internasional dan teori feminisme liberal.

1. Peranan Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dalam Hubungan Internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja sama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Organisasi internasional menurut Clive Archer dalam bukunya "*International Organizations*" bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama. (Archer, 1983, p. 35)

Menurut Harold K Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok:

- 1) Fungsi informasi, termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menjalankan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

- 2) Fungsi normatif meliputi pendefinisian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
- 3) Fungsi pembuatan aturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan efek yang lebih mengikat secara hukum.
- 4) Fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
- 5) Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi, misalnya penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer (Sugito, 2016)

Pada tingkat internasional, organisasi internasional berperan dalam:

- 1) Memberikan kontribusi untuk terciptanya kerjasama diantara aktor/Negara. Dengan adanya organisasi internasional diharapkan Negara dapat saling bersosialisasi secara regular sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis.
- 2) Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran Collective Goods. Dimana organisasi Internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survei, dan juga pengawasan.
- 3) Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.
- 4) Mengkoordinir aktifitas internasional mengenai permasalahan bersama.

5) Menyediakan arena untuk bargaining bagi Negara-negara yang menyelesaikan permasalahan.

6) Membentuk rezim internasional. (Mingst, 1999)

2. Teori Feminisme Liberal

Penelitian ini menggunakan teori feminisme dengan memfokuskan pada perspektif feminisme liberal, menurut Burchil dan Linklater bahwa feminisme seharusnya diberi tempat yang layak pada khazanah hubungan internasional karena feminisme menawarkan pemikiran kritis dan spesifik terkait dengan berbagai permasalahan di dunia ini (Burchill, 2005)

Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang berkonsentrasi pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Feminisme liberal sangat mendukung hak-hak individu dalam memenuhi keinginan, kepentingan dan cita-cita yang harus dilindungi oleh hukum (Steans, 2006) Marry Caprioli dan Mark Boyer menyatakan bahwa feminisme liberal aktif dalam penanganan masalah pengungsi perempuan, ketidakadilan pembagian upah antara laki-laki dan perempuan, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, seperti kekerasan dan tindak asusila (Boyer, 2001)

Dalam kaitannya penulis menggunakan teori peranan organisasi internasional dan teori feminisme liberal, dimana pada teori peranan organisasi internasional yaitu UNHCR sebagai organisasi internasional yang dinaungi oleh PBB berperan aktif dalam penanganan serta memberikan perlindungan terhadap pengungsi akibat peristiwa yang terjadi diberbagai suatu negara. Sedangkan dalam teori feminisme liberal yaitu berkaitan dengan perlindungan

pengungsi perempuan, dimana feminisme liberal ini mendukung adanya kesetaraan bagi perempuan terutama hak-hak bagi individu yang berada di pengungsian. Korelasi kedua teori tersebut dianggap sesuai karena penelitian ini akan membahas tentang peranan organisasi internasional dan pengungsi perempuan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian pertama

Penelitian pertama berjudul “Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015” oleh Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana dalam *Jurnal HAM Vol. 11 No. 1 (April 2020)* membahas mengenai masalah pengungsi Internasional Rohingya serta respon yang dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat aceh dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tahunnya yaitu tahun 2015 dan penelitian tersebut sama-sama berfokus di Aceh sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada pola penanganan pengungsi melalui aktor didalamnya yang menggunakan “segitiga penanganan kolaboratif” yaitu Indonesia, UNHCR dan *International Organization for Migration (IOM)* sedangkan peneliti hanya berfokus pada penanganan pengungsi melalui aktor didalamnya yaitu Indonesia dan UNHCR.

2. Penelitian kedua

Penelitian selanjutnya berjudul “Peran *United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR)* Dalam Memberikan Perlindungan

Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional” oleh Ferdiansyah Putra dan Rosmawati dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol. 3 No. 3 (Agustus 2019)* penelitian ini membahas tentang peran UNHCR kepada pengungsi anak Rohingya yang ada ditempat penampungan Aceh dengan hasil penelitiannya adalah upaya perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi anak Rohingya saat ini yaitu telah menerima dan memberikan penampungan terhadap para pengungsi Rohingya terutama dari kalangan pengungsi anak yang terdampar di Aceh secara sukarela, untuk menghormati prinsip *non refoulment* sebagai norma umum dalam Hukum Internasional. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui ikatan dinas telah banyak membantu memfasilitasi berbagai keperluan hidup pengungsi Rohingya terutama kalangan anak. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada tempat penelitiannya yaitu di Aceh sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti berfokus pada pengungsi perempuan sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengungsi anak.

3. Penelitian ketiga

Penelitian ketiga berjudul “Peran *United Nations High Commisioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia” oleh Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu dan Trilke Tulung dalam jurnal *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Tahun 2018* penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil

penelitiannya adalah adanya kerjasama antara Indonesia dengan UNHCR karena akibat terdamparnya pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah subjek penelitiannya yaitu penanganan pengungsi, lalu objek penelitian keseluruhan pengungsi, namun untuk penelitian peneliti tulis subjeknya adalah perlindungan dan objeknya adalah pengungsi perempuan.

Jadi secara garis besar penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu membahas tentang peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Perlindungan Terhadap Pengungsi Perempuan Etnis Rohingya di Aceh Tahun 2015-2017 yang tentu saja berbeda dari penelitian-penelitian di atas, dimana penelitian ini membahas peran UNHCR yang melindungi “pengungsi perempuan” di Aceh tahun 2015-2017, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya berisi tentang peran UNHCR yang melindungi pengungsi Rohingya di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berarti peneliti mengambil data dari berbagai literatur seperti dari jurnal, buku-buku, maupun dari situs resmi yang tersedia untuk dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

Teknik analisa data merupakan kegiatan terpenting dalam penelitian. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa data dengan pengumpulan data secara lengkap serta kejelasan dalam melakukan pengumpulan data, pengelompokan data dari hasil penelitian, dan pengujian terhadap data yang sudah dikumpulkan. (Patton, 1980)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa merupakan sesuatu yang perilakunya hendak dideskripsikan, dan unit Analisa dalam penelitian ini adalah peranan UNHCR dalam perlindungan terhadap pengungsi perempuan khususnya terhadap etnis Rohingya di Aceh pada tahun 2015-2017. Sedangkan unit eksplanasi adalah obyek yang akan mempengaruhi unit analisa. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah pengungsi perempuan Rohingya yang ada di Aceh.

H. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini fokus pada peranan UNHCR dalam perlindungan terhadap pengungsi perempuan etnis Rohingya di Aceh, dimana pengungsi perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan saat berada di pengungsian.

Ruang lingkup spasial pada penelitian ini adalah Aceh, keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia tersebar di beberapa daerah seperti Medan, Tanjung Pinang, Batam dan Aceh. Namun dari beberapa wilayah tersebut Aceh

merupakan daerah yang paling banyak kedatangan pengungsi Rohingya, hal tersebut tidak terlepas karena secara geografis wilayah Aceh merupakan yang paling dekat dengan Myanmar.

Selain itu, peneliti mengambil rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, karena pada tahun tersebut banyak pengungsi Rohingnya yang masuk ke wilayah Indonesia yaitu di Aceh, sekitar pada tahun 2015 tercatat kurang lebih sebanyak 11.941 pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh (Kusumawardhana, 2020)

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I Merupakan kerangka dasar bagi keseluruhan proses penelitian, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Membahas tentang UNHCR yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan peranannya.

Bab III Membahas pengungsi perempuan etnis Rohingya di Aceh

Bab IV berisi analisis tentang peranan UNHCR dalam perlindungan pengungsi perempuan etnis Rohingya di Aceh.

Bab V kesimpulan dan saran serta dibagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran